

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
( R E N J A - P )  
KECAMATAN TONGAS KAB. PROBOLINGGO  
TAHUN 2023**



**KECAMATAN TONGAS  
KABUPATEN PROBOLINGGO  
TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir jaman.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Tongas ini disusun dengan harapan Memberikan arah/acuan dalam penyusunan Program/Kegiatan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Kecamatan Tongas Tahun 2023 serta mendapat dukungan semua pemangku kepentingan agar tujuan tercapai dan tepat sasaran sebagaimana ditargetkan.

**CAMAT TONGAS  
KABUPATEN PROBOLINGGO**



**ROCHMAD WIDIARTO.S.STP.**

**Pembina**

**NIP. 19791017 200012 1 001**

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
Halaman Judul .....	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel.....	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1.      Latar Belakang .....	I-1
1.2.      Landasan Hukum .....	I-4
1.3.      Maksud dan Tujuan .....	I-6
1.4.      Sistematika Penulisan .....	I-6
<b>BAB II      EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022               SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .....</b>	<b>II-9</b>
2.1.      Rekapitulasi Evaluasi Anggaran .....	I- 9
2.2.      Rekapitulasi Capaian Kinerja .....	II-12
<b>BAB III     RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>III-15</b>
<b>BAB IV      PENUTUP .....</b>	<b>IV-18</b>

## DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 2.1 .....	9
Tabel 2.2 .....	13
Tabel 3.1 .....	15

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perubahan Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk menyesuaikan target indikator kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan triwulan II melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah, termasuk percepatan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) dan penanggulangan kemiskinan

Melakukan penajaman prioritas kegiatan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka pelayanan publik serta penanganan bencana dan pasca bencana. ( Perda ttg RKPD-P )

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja OPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang

berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD serta selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Renja OPD merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja OPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya.

Demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya. Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD.

Oleh karena itu, OPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan OPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2023.

Dalam perjalanan waktu terdapat perkembangan yang menyebabkan Rencana Kerja OPD perlu disesuaikan dengan keadaan. Antara lain penertiban administrasi Perkantoran, perubahan honor non-PNS serta pelaksanaan Program Kegiatan yang semakin mengarah kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 dalam pasal 9 ayat 1 bahwa dalam hal RKPD tahun 2019 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan maka dapat dilakukan perubahan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo perlu diselaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023, sedangkan anggaran disesuaikan dengan plafon pagu indikatif belanja langsung Tahun Anggaran 2022 yang telah disesuaikan.

Jadi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tongas Tahun Anggaran 2023, disamping berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tongas tahun 2018–2023, juga diselaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Kecamatan Tongas dokumen Renja Kecamatan Tongas memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tongas. Adapun indikator rencana kinerja meliputi sasaran, program dan kegiatan.

#### **4.3. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Probolinggo;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo tahun 2005 – 2025 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo tahun 2013 – 2019 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2021;
12. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2019.
13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **5.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo tahun 2023 adalah :

1. Memberikan gambaran kemampuan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan misinya untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat/pimpinan instansi.
2. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo serta indikator atau ukuran keberhasilan/kegagalan pada tahun 2023.
3. Memberikan arah/acuan dalam penyusunan Program/Kegiatan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Kecamatan 1 tahun 2023.

### **6.3. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang latar belakang Perubahan Renja OPD tahun 2023

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo tahun 2023

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo tahun 2023 serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II : EVALUASI KINERJA OPD TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Menggambarkan kajian terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo tahun 2023 s/d TW II ( Juni 2023 )

2.1. Rekapitulasi Realisasi Anggaran

Menguraikan mengenai realisasi anggaran Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo tahun 2023 s/d TW II (Juni 2023 )

2.2. Rekapitulasi Capaian Kinerja

Menguraikan mengenai realisasi capaian kinerja Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo tahun 2023 s/d TW II ( Juni 2023 ).

**BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Menjelaskan mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 setelah Perubahan Renja untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo

**BAB IV : PENUTUP**

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

# EVALUASI KINERJA SKPD TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

2.1. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Probolinggo tahun 2023 sampai dengan Triwulan II ( Juni 2023 ) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL 2.1.**  
**REALISASI ANGGARAN**  
**KECAMATAN TONGAS**  
**KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**S/D TW II TAHUN 2023 ( S/D Juni 2022 )**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>a.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.600.000</b>	0	0
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	900.000	0	0
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	900.000	0	0
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	900.000	0	0
	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	0
	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	900.000	0	0
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
<b>b.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.131.380.416</b>	0	0
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,119,776,416	1,089,324,259	53,15

	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.804.000	0	0
	c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.200.000	0	0
	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1.800.000	0	0
	e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.800.000	0	0
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	0
	g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0
<b>c.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>33.440.025</b>	0	0
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.323.000	0	0
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.021.425	0	0
	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.585.600	0	0
	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	1.600.000	0
	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	600.000	0	0
	f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.910.000	1.350.000	0
<b>d.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>42.806.000</b>	0	0
	Pengadaan Mebel	3.686.000	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.120.000	0	0
<b>e.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>202.829.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	510.000	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.805.775	524,810	0
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.838.400	0	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153.478.296	38,170,001	50,27
<b>f.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>45.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.250.000	0	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.600.000	0	0
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
<b>a.</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>57.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	58.700.000	900.000	39,70
<b>b.</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>28.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	24.000.000	0	0
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			
a.	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>371.515.800</b>	<b>0</b>	0
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.178.500	4.150.000	22,83
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan	353.337.300	42.660.000	28,32
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0
b.	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	50.000.000	0	0
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
a.	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>39.220.000</b>	<b>0</b>	0
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	31.500.000	0	0
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.720.000	0	0
<b>5.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			
a.	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>28.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	28.800.000	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.019.944.712</b>	<b>1.101.689.075</b>	<b>43,58</b>

Dari tabel 2.1 tersebut, dapat dilihat bahwa secara umum penyerapan anggaran Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 baru terealisasi 1.101.689.075,- (43,58%) dari seluruh anggaran tersedia. Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan realisasi masih dibawah, hal ini disebabkan :

- Kendala proses pengukuhan Pajabat Definitif;
- Belum maksimalnya penyerapan belanja SKPD;
- Masih terdapat proses perubahan penjabaran APBD untuk penyesuaian juknis-juknis dari Pemerintah Pusat;
- Penyesuaian proses digitalisasi belanja dengan Mbiz Market, E-Katalog dll.

Sehubungan dengan hal diatas, pengelolaan program / kegiatan serta ketersediaan sarana/prasarana harus diupayakan untuk lebih ditingkatkan, lebih terencana dan sistematis sehingga target kinerja Renja tahun 2023 dapat tercapai secara optimal.

## **2.2. Rekapitulasi Capaian Kinerja**

Adapun capaian kinerja Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo tahun 2023 sampai dengan Triwulan II (Juni 2023) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL 2.2.**  
**EVALUASI CAPAIAN KINERJA**  
**KECAMATAN TONGAS**  
**KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**S/D TW II TAHUN 2023 ( S/D JUNI 2023 )**

Prioritas Pembangunan Tahun 2021	Sasaran Pembangunan RPJMD Kab. Probolinggo Tahun 2018 - 2023	Kinerja				
		Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi s/d TW II 2023	
1	2	3	4	5	6	
Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Partisipatif, Transparan & Akuntabel	Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan	1	Terlaksananya pengamanan wilayah kecamatan	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana
		2	Terselenggaranya pembinaan Satpol PP & Linmas	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana
		3	Terlaksananya pembinaan & fasilitasi perubahan & pertanggungjawaban APBD Desa	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana
		4	Tersusunnya rencana kerja kecamatan	Ada/Tidak	Ada	Tidak
		5	Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan musrenbang	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana
		6	Terlaksananya partisipasi masyarakat dlm pembangunan desa	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana
		7	Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan pembinaan sosial	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana
		8	Terlaksananya pemantauan harga & kelancaran distribusi sembako	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana
		9	Terlaksananya peringatan Maulid Nabi	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana
		10	Terlaksananya halal bihalal tingkat kecamatan	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana
		11	Terlaksananya Program Pelaksanaan Koordinasi Dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesra	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana
		12	Terlaksananya Program Pelaksanaan Koordinasi Dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Ekonomi	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana
		13	Terlaksananya Program Pelaksanaan Koordinasi Dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Trantibmas	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana
		14	Terlaksananya Program Pelaksanaan Koordinasi Dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Pembangunan	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana
		15	Terlaksananya Program Pelaksanaan Koordinasi Dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Pemerintahan	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana
		16	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana
		17	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana

		18	Terlaksananya Program peningkatan dan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksana/ Tidak	Terlaksana	Terlaksana
--	--	----	--	----------------------	------------	------------

Kinerja Kecamatan Tongas tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sampai dengan triwulan II (bulan Juni), Maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tongas Tahun 2023.

Masih belum optimalnya pencapaian target sasaran disebabkan oleh peningkatan dan berkurangnya volume kegiatan seperti yang direncanakan dalam Renja tahun 2023.

## **BAB III**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran diperlukan program dan kegiatan yang sesuai. Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Adapun indikator rencana kinerja meliputi sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL 3.1.**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS**  
**KECAMATAN TONGAS**  
**KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**PADA RENJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Program / Kegiatan	Sebelum	Sesudah	
<b>KECAMATAN TONGAS</b>	<b>3.154.285.646</b>	<b>3.008.940.095</b>	<b>(145.345.551)</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.679.119.846</b>	<b>2.533.654.295</b>	<b>(145.465.551)</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>0</b>
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	900.000	900.000	0
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	900.000	900.000	0
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	900.000	900.000	0

Perubahan RKA-SKPD			
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.200.000	1.200.000	0
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	900.000	900.000	0
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.200.000	1.200.000	0
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.400.000	2.400.000	0
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.385.567.350</b>	<b>2.240.221.799</b>	<b>(145.345.551)</b>
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.372.667.350	2.227.321.799	(145.345.551)
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.500.000	4.500.000	0
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1.200.000	1.200.000	0
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1.800.000	1.800.000	0
e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.800.000	1.800.000	0
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.800.000	1.800.000	0
g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.800.000	1.800.000	0
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>33.713.000</b>	<b>33.713.000</b>	<b>0</b>
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.323.000	2.323.000	0
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.294.400	10.294.400	0
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.585.600	2.585.600	0
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	12.000.000	0
e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	600.000	600.000	0
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.910.000	5.910.000	0
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>11.828.400</b>	<b>11.828.400</b>	<b>0</b>
Pengadaan Mebel	3.686.000	3.686.000	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.142.400	8.142.400	0
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>193.761.096</b>	<b>193.641.096</b>	<b>(120.000)</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	510.000	510.000	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.294.400	29.294.400	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.838.400	1.838.400	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.118.296	161.998.296	(120.000)
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>45.850.000</b>	<b>45.850.000</b>	<b>6.460.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.600.000	24.600.000	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.250.000	21.250.000	0
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>76.200.000</b>	<b>76.200.000</b>	<b>0</b>
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan</b>	<b>57.000.000</b>	<b>57.000.000</b>	<b>0</b>

<b>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			
Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	57.000.000	57.000.000	0
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>19.200.000</b>	<b>19.200.000</b>	<b>0</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	19.200.000	19.200.000	0
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>290.065.800</b>	<b>325.665.800</b>	<b>35.600.000</b>
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>290.065.800</b>	<b>275.665.800</b>	<b>(14.400.000)</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.178.500	18.178.500	0
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan	257.487.300	257.487.300	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.400.000	0	<b>(14.400.000)</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			
Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0	50.000.000	50.000.000
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>77.400.000</b>	<b>41.920.000</b>	<b>(35.480.000)</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>77.400.000</b>	<b>41.920.000</b>	<b>(35.480.000)</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48.600.000	34.200.000	(14.400.000)
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	28.800.000	7.720.000	(21.080.000)
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<b>31.500.000</b>	<b>31.500.000</b>	<b>0</b>
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	31.500.000	31.500.000	0
<b>JUMLAH</b>	<b>3.154.285.646</b>	<b>3.008.940.095</b>	<b>(145.345.551)</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tongas Tahun 2023 disusun untuk meningkatkan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Renja Perubahan ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2023, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Probolinggo.

Demikian penyusunan Perubahan Renja Tongas tahun 2023 ini kami susun.

CAMAT TONGAS  
KABUPATEN PROBOLINGGO



**ROCHMAD WIDIARTO.S.STP**

Pembina

NIP. 19791017 200012 1 001